

**MANAJEMEN AGRIBISNIS SAPI PERAH:
SUATU TELAAH PUSTAKA**

Oleh:

Achmad Firman, SPt., MSi

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
PEBRUARI 2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Mandiri

-
1. a. Judul Penelitian :
 “Manajemen Agribisnis Sapi Perah: Suatu Telaah Pustaka”
 b. Bidang Ilmu : Pertanian/Ekonomi Peternakan
-
2. Peneliti
 a. Nama Lengkap dan Gelar : Achmad Firman, SPt., MSi
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. Gol/Pangkat/NIP : IIIb/Penata TK I/132 297 365
 d. Jabatan Fungsional : Lektor
 e. Jabatan Struktural : -
 f. Fakultas/Jurusan : Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan
 g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran
-
3. Lokasi Penelitian : Indonesia
-
4. Kerjasama dengan institusi lain : Tidak ada
-
5. Sumber Dana : -
-

Bandung, Pebruari 2007

Mengetahui
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi
NIP: 132 297 36

PERKEMBANGAN SAPI PERAH DI INDONESIA

Pendahuluan

Usaha persusuan di Indonesia sudah sejak lama dikembangkan. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan persusuan di Indonesia dibagi menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu Tahap I (periode sebelum tahun 1980) disebut fase perkembangan sapi perah, Tahap II (periode 1980 – 1997) disebut periode peningkatan populasi sapi perah, dan Tahap III (periode 1997 sampai sekarang) disebut periode stagnasi. Pada tahap I, perkembangan peternakan sapi perah dirasakan masih cukup lambat karena usaha ini masih bersifat sampingan oleh para peternak. Pada tahap II, pemerintah melakukan impor sapi perah secara besar-besaran pada awal tahun 1980-an. Tujuan dilakukannya impor besar-besaran adalah untuk merangsang peternak untuk lebih meningkatkan produksi susu sapi perahnya. Selain itu, peningkatan populasi sapi perah ditunjang oleh permintaan akan produk olahan susu yang semakin meningkat dari masyarakat. Di samping itu, pemerintah mencoba melakukan proteksi terhadap peternak rakyat dengan mengharuskan Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk menyerap susu dari peternak. Sedangkan untuk tahap III, perkembangan sapi perah mengalami penurunan dan stagnasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di samping itu, pemerintah mencabut perlindungan terhadap peternak rakyat dengan menghapus kebijakan rasio susu impor dan susu lokal terhadap IPS (Inpres No.4/1998). Kebijakan ini sebagai dampak adanya kebijakan global menuju perdagangan bebas *barrier*. Berdasarkan dengan kebijakan tersebut, maka peternak harus mampu bersaing dengan produk susu dari luar negeri, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Seiring dengan perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia, berbagai permasalahan persusuan pun semakin bertambah pula baik permasalahan dari sisi peternak, koperasi, maupun dari industri pengolahan susu. Sejak dilakukan impor sapi perah secara besar-besaran dari Australia dan New Zealand pada awal tahun 1980-an, ternyata produktivitas usahaternak rakyat masih tetap rendah seolah jalan ditempat, karena manajemen usahaternak dan kualitas pakan yang diberikan sangat tidak memadai. Memperbaiki manajemen peternakan rakyat merupakan problema yang cukup kompleks, tidak hanya merubah sikap peternak tetapi juga bagaimana menyediakan stok bibit yang baik dan bahan pakan yang berkualitas dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dampaknya terlihat pada rendahnya kualitas susu yang ditunjukkan oleh tingginya kandungan bakteri (*Total Plate Count* = TPC), rata-rata diatas 10 juta/cc. Padahal, yang direkomendasi harus dibawah 1 juta/cc. Di sisi lain, nilai *total solid* (TS) masih dibawah rata-rata yaitu di bawah 11,3%. Dengan kata lain, permasalahan yang terjadi di tingkat peternak adalah tingkat kualitas susu yang dihasilkan masih sangat rendah, baik dari sisi total bakteri (TPC) ataupun *Total Solid* (TS).

Permasalahan yang dihadapi pada persusuan di Indonesia adalah di tingkat lembaga koperasi. Sebagai lembaga yang mengelola persusuan dari peternak dan mendistribusikan kepada IPS serta sebagai perwakilan peternak dalam memperjuangkan aspirasi peternak, koperasi mempunyai peran yang cukup

strategis untuk menopang perkembangan persusuan di Indonesia. Perkembangan dari koperasi persusuan tergantung pada mekanisme yang terjadi di koperasi tersebut. Bila para pengurus koperasi yang menjalankan roda perkoperasiannya tidak amanah, maka dapat berdampak pada kehancuran dari peternakan susu yang berada di wilayah tersebut. Berbagai kasus yang berkenaan dengan bangkrutnya koperasi susu telah terjadi di beberapa wilayah persusuan di Jawa Barat.

Belum lagi selesai permasalahan di atas, muncul era perdagangan bebas khususnya di kawasan ASEAN (AFTA= *Asian Free Trade Association*) di mana Indonesia mau tidak mau atau suka tidak suka harus ikut dalam kancah global tersebut. Dalam perdagangan bebas tersebut, restriksi perdagangan terutama tarif bea masuk setahap demi setahap harus dikurangi sampai mencapai 0 %. Dengan adanya perdagangan bebas ini, produk susu segar impor dapat memasuki pasaran Indonesia dengan mudah. Satu sisi, hal ini dapat memberikan peluang dan kesempatan pada konsumen untuk memilih produk susu yang mereka inginkan sesuai dengan kualitas dan harga yang dapat mereka jangkau. Tapi di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan keterpurukan bagi para peternak sapi perah karena ketidakmampuan bersaing dalam sisi harga, kualitas, dan produksi susu dibandingkan dengan susu segar impor. Kondisi inilah yang menyebabkan para peternak sapi perah kembali tidak bergairah untuk meneruskan usaha peternakan sapi perahnya.

Berdasarkan berbagai kendala dan kondisi di atas dapat berdampak pada dua hal, yaitu berdampak pada kehancuran peternakan sapi perah di Indonesia atau tetap exist peternakan sapi perah di Indonesia. Kehancuran peternakan sapi perah dapat terjadi bila para pelaku tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya pelaku yang satu menekan pelaku yang lain. Namun dapat pula peternakan sapi perah di Indonesia tetap exist bila secara sigap seluruh pelaku dapat memperbaiki kondisi yang ada dalam menghadapi tantangan global dan kompetisi perdagangan yang semakin ketat.

Perkembangan Populasi dan Produksi Susu

Seperti yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa budidaya sapi perah di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1890. Sampai dengan tahun 1969, jumlah populasi sapi perah di Indonesia mencapai 52.000 ekor yang menghasilkan 28.900 ton susu segar (Soepodo Boediman, 2003). Perkembangan sapi perah pun mulai terlihat setelah adanya impor sapi perah secara besar-besaran pada tahun 1980-an.

Tabel 1. Populasi Sapi Perah di Indonesia Tahun 2000 – 2004

(ekor)

No	Propinsi	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004*
1	Nangroe Aceh Darussalam	55	61	67	73	81
2	Sumatera Utara	6420	6445	6470	6575	6641
3	Sumatera Barat	526	502	488	505	523
4	Riau	0	0	0	0	0
5	Jambi	23	pm	26	0	0

No	Propinsi	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004*
6	Sumatera Selatan	202	302	275	220	331
7	Bengkulu	0	110	62	157	132
8	Lampung	106	4054	105	112	92
9	DKI Jakarta	3857	84934	3833	3611	3486
10	Jawa Barat	84788	114915	91219	95513	99739
11	Jawa Tengah	114834	4454	119026	127658	129692
12	DI Yogyakarta	4069	130922	4917	6645	6977
13	Jawa Timur	139075	67	131262	131827	132750
14	Bali	67	0	54	28	28
15	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	14
16	Nusa Tenggara Timur	0	69	0	0	0
17	Kalimantan Barat	50	0	35	14	17
18	Kalimantan Tengah	0	64	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	59	23	74	79	81
20	Kalimantan Timur	25	0	24	0	0
21	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	0	44	0	0	0
23	Sulawesi Selatan	25	0	306	602	884
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	0	0	0	0	0
26	Papua	72	0	111	97	100
27	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
28	Banten	0	32	32	37	37
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0
	Jumlah	354253	346998	358386	373753	381605

Keterangan : * angka sementara 2004, Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2004

Berdasarkan catatan statistik Direktorat Jenderal Peternakan, tidak semua propinsi memiliki sapi perah. Konsentrasi terbesar dari populasi sapi perah terdapat di pulau jawa. Beberapa propinsi yang tidak memiliki sapi perah, yaitu Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Gorontalo. Jumlah populasi ternak secara series dari tahun 2000 – 2004 mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Propinsi Jawa Timur mempunyai populasi sapi perah yang terbesar dibanding dengan propinsi lainnya, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perkembangan populasi ternak yang cukup besar tersebut didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang persapiperahan, seperti IPS, Balai Inseminasi Buatan, lingkungan geografis, dan para peternak yang telah lama bergelut dengan sapi perah. Di samping itu, faktor positif yang menunjang perkembangan populasi sapi perah di pulau jawa adalah pulau jawa merupakan sumber pasar yang potensial untuk produk susu dengan jumlah populasi penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan propinsi lainnya.

Data populasi ternak di atas dapat berkorelasi positif dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan. Selama 10 tahun (1969 – 1979), produksi susu hanya mencapai 72.200 ton dan dalam kurun waktu 24 tahun (1969 – 2004),

produksi susu mencapai 586 ribu ton. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sapi perah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Bila dilihat dari jumlah produksi susu yang dihasilkan untuk pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Jumlah produksi susu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami peningkatan. Bila dilihat dari data per propinsi, peningkatan produksi susu yang cukup signifikan terjadi di propinsi Jawa Barat. Walaupun jumlah sapi perahnya lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun pada tahun 2004 propinsi Jawa Barat mempunyai produksi susu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi susu di propinsi lainnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas sapi perah yang berada di Jawa Barat lebih baik dibandingkan dengan propinsi lainnya (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Produksi Susu Segar di Indonesia Tahun 2000 – 2004

(ton)

No	Propinsi	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004*
1	Nangroe Aceh Darussalam	65	72	79	91	10
2	Sumatera Utara	4615	4622	4639	4658	4675
3	Sumatera Barat	530	506	492	833	863
4	Riau	0	0	0	0	0
5	Jambi	11	0	24	29	29
6	Sumatera Selatan	187	300	302	302	302
7	Bengkulu	0	130	117	48	50
8	Lampung	75	77	78	78	78
9	DKI Jakarta	5094	6130	5795	5795	5795
10	Jawa Barat	184515	184833	198510	207855	246322
11	Jawa Tengah	78931	81578	80064	82906	83901
12	DI Yogyakarta	6888	4405	5299	5597	5652
13	Jawa Timur	214581	196946	197458	235942	238208
14	Bali	0	85	68	35	36
15	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	14
16	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Barat	64	97	45	16	17
18	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Selatan	59	65	73	80	83
20	Kalimantan Timur	32	32	32	32	32
21	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
23	Sulawesi Selatan	0	1	232	0	0
24	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
25	Maluku	0	0	0	0	0
26	Papua	0	0	0	0	0
27	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
28	Banten	0	68	38	38	40
29	Gorontalo	0	0	0	0	0
30	Maluku Utara	0	0	0	0	0
	Jumlah	495647	479947	493345	553442	586107

Keterangan : * angka sementara 2004, Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2004

Kondisi Permintaan Sapi Perah dan Produk Susu

Sapi perah adalah ternak penghasil susu yang dengan proses pasteurisasi dan sterilisasi maka produk susu tersebut dapat langsung di konsumsi. Jadi permintaan akan ternak sapi perah tergantung dari permintaan produk susunya itu sendiri. Pada tahun 1979 produksi susu mencapai 72.200 ton sedangkan konsumsi susu mencapai 532.700 ton. Ini menunjukkan bahwa hanya 13,5% susu dalam negeri yang mampu memenuhi permintaan konsumen tersebut. Artinya 86,5% kekurangan susu tersebut dipenuhi dari impor susu luar negeri. Begitu pula dengan tahun-tahun berikutnya, permintaan akan susu belum mampu dipenuhi oleh produksi susu dalam negeri.

Berdasarkan data statistik peternakan (2001), permintaan produksi susu untuk tahun 2001 mencapai 1.200 ribu ton sedangkan produksi susu lokal hanya mampu memproduksi 480 ribu ton dan selebihnya didatangkan dari impor. Dengan kata lain, produksi susu dalam negeri baru mampu memenuhi permintaan sebesar 30% dan 70% berasal dari impor. Realisasi impor bahan baku susu dan produk jadi dari tahun 1997 s/d 1999 seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Impor Susu dari tahun 1997 s/d 1999

Uraian		Tahun		
		1997	1998	1999
1.	Bahan baku	67.101	48.852	61.398
2.	Produk jadi (finish product)	21.376	19.016	23.548
3.	Total	88.477	67.886	84.946
4.	Equivalen SSDN	707.816	542.944	679.568

Sumber: Departemen Pertanian 2002

Tabel 4. Perkembangan Populasi, Produksi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi Susu di Indonesia Tahun 1997 - 2001

No	Uraian	Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1.	Populasi (ribu ekor)	335,0	322,0	332,0	354,3	347,0
2.	Produksi susu (ribu ton)	357,2	316,4	436,0	495,7	479,9
3.	Ekspor susu (ribu ton)	44,2	66,0	142,0	575,5	610,0
4.	Impor susu (ribu ton)	692,8	527,3	822,0	1.479,8	1.330,0
5.	Konsumsi susu (ribu ton)	1.050,0	843,7	1.116,0	1.400,0	1.200,0

Sumber: Statistik Peternakan Indonesia Tahun 2001

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa permintaan susu impor terus meningkat sedangkan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) peningkatannya tidak sebanding dengan permintaannya. Hal ini dapat dimengerti karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan, maka konsumsi susu pun akan semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa terdapat prospek yang cukup cerah terhadap agribisnis sapi perah di Indonesia. Peningkatan jumlah populasi ternak sapi perah merupakan solusi yang

harus ditempuh oleh Indonesia bila kebutuhan susu dalam negeri dapat dipenuhi oleh domestik.

Dari dua produk susu tersebut (susu dalam negeri dan susu impor) dapat diidentifikasi beberapa perbedaan yang cukup mendasar, yaitu dari sisi harga, kualitas susu, dan produktivitas sapi. Susu segar impor memiliki kualitas dan harga yang relative bersaing dibandingkan dengan susu segar dalam negeri (SSDN). Begitu pula dengan tingkat produktivitas dari sapi perahnya, di mana sapi-sapi perah luar negeri memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan sapi perah di dalam negeri. Hasil penelitian Chai, dkk, (1996), di Jawa Barat menunjukkan skala usaha peternakan sapi perah sekitar 5,8 ekor/unit usaha dan kemampuan produksi sekitar 11,6 liter/ekor/hari. Sebagaimana diketahui bahwa hampir 90% produksi susu dalam negeri berasal dari usaha sapi perah rakyat dengan kepemilikan sapi perah sebanyak 4 – 6 ekor.

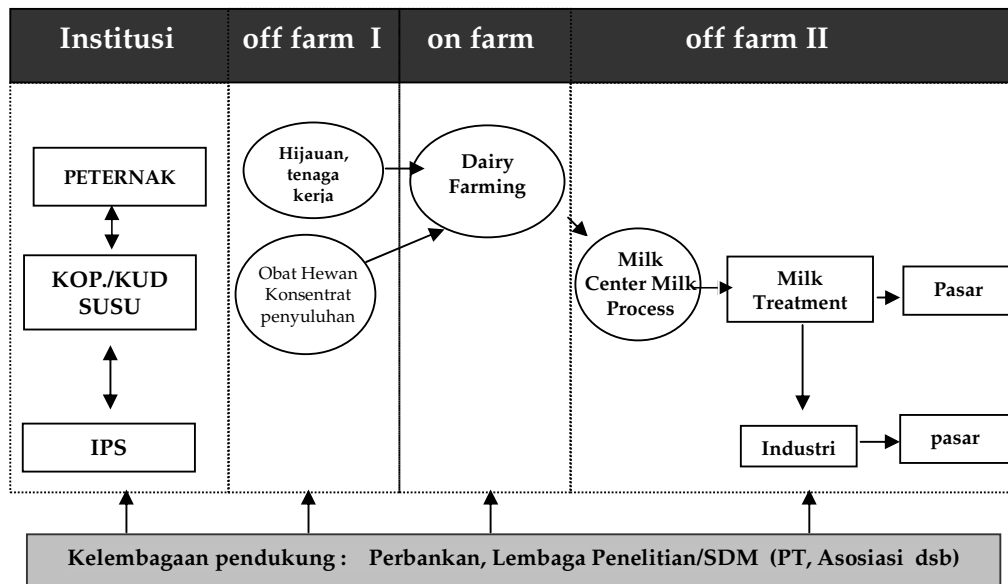
Berdasarkan dari data-data di atas dapat dikatakan bahwa nilai neraca pembayaran antara produk susu yang diekspor dengan yang diimpor menunjukkan angka defisit. Hal ini menandakan bahwa nilai rupiah kita untuk transaksi perdagangan antar negara lebih banyak tersedot ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Artinya kontribusi yang diberikan oleh persusuan di Indonesia lebih banyak menghasilkan modal keluar (capital flight) dibandingkan dengan memasukan modal luar negeri ke dalam negeri.

MENGENAL SISTEM AGRIBISNIS SAPI PERAH DI INDONESIA

Sistem agribisnis pada komoditas sapi perah dibangun berdasarkan sistem *vertical integration*, yaitu antar pelaku agribisnis satu sama lain saling tergantung pada produk susu. Produksi susu hasil peternakan rakyat sebagian besar disalurkan ke Koperasi/KUD persusuan yang kemudian di pasarkan kepada Industri Pengolah Susu. Koperasi memberikan pelayanan kepada peternak sebagai anggotanya, berupa pemasaran hasil produksinya juga melayani kebutuhan konsentrat, obat-obatan, IB, memberikan fasilitas penyaluran kredit, dan memberikan pelayanan penyuluhan.

Pada kenyataannya usaha peternakan sapi perah rakyat ini dihadapkan dalam dua masalah besar, yaitu masalah *zooteknik* dalam menghadapi pasar global dan masalah kelembagaan sosial ekonomi yang kurang mendukung terhadap kinerja usahanya. Kedua aspek tersebut, seperti lingkaran setan yang saling berkaitan sehingga mengakibatkan perkembangan usaha peternakan rakyat dalam kurun waktu dua puluh tahun ini seperti jalan di tempat.

Melihat sistem agribisnis tersebut (Gambar1), tampak bahwa bisnis persusuan tidak dapat dipisahkan antara subsistem *off farm I* (pra produksi=subsistem I), *on farm* (budidaya=subsistem II) dan *off farm II* (pasca produksi=subsistem III dan pemasaran hasil=subsistem IV) serta sub system pendukungnya, yaitu lembaga keuangan dan lembaga-lembaga Penelitian/penyediaan SDM.



Gambar 1. Pola Agribisnis Peternakan Sapi Perah di Jawa Barat
(Tim Peneliti Fakultas Peternakan, 2003)

Pada subsistem I (pra produksi), semua input produksi (konsentrat, obat-obatan, hijauan, semen beku, peralatan inseminasi buatan, alat-alat dan mesin perah, dan sebagainya) disuplai untuk kegiatan budidaya sapi perah. Dengan adanya suplai input produksi tersebut, maka keberadaan sapi perah telah memajukan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang input produksi, seperti adanya pabrik pakan, pabrik peralatan dan mesin perah, dan sebagainya. yang diproduksi oleh perusahaan

Produk susu yang dihasilkan oleh sapi perah tidak dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen namun harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Salah satu proses pengolahan yang sangat sederhana dan konsumen dapat dengan aman meminumnya adalah dengan proses pemanasan dengan suhu rata-rata 70 °C atau sampai 100 °C atau dikenal dengan istilah pasteurisasi dan sterilisasi. Tujuan dari proses pengolahan ini adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya bagi manusia atau disebut dengan bakteri patogen, misalnya jenis bakteri streptococcus. Susu yang dihasilkan dari peternak selanjutnya masuk cooling unit yang disediakan oleh koperasi. Selanjutnya koperasi langsung menjualnya ke IPS untuk diolah lebih lanjut. Berbagai produk yang dihasilkan oleh IPS dapat berupa susu sterilisasi dalam kemasan karton, susu tepung, youghurt, es krim, dan sebagainya. Produk-produk tersebut selanjutnya dipasarkan ke konsumen melalui sistem tataniaga yang telah terbangun sebelumnya, seperti pedagang besar, pedagang pengumpul, retail dan akhirnya ke konsumen.

Keseluruhan subsistem dalam agribisnis peternakan sapi perah saling membutuhkan satu sama lainnya. Satu subsistem lain yang menunjang perkembangan dari agribisnis peternakan sapi perah adalah subsistem pendukung

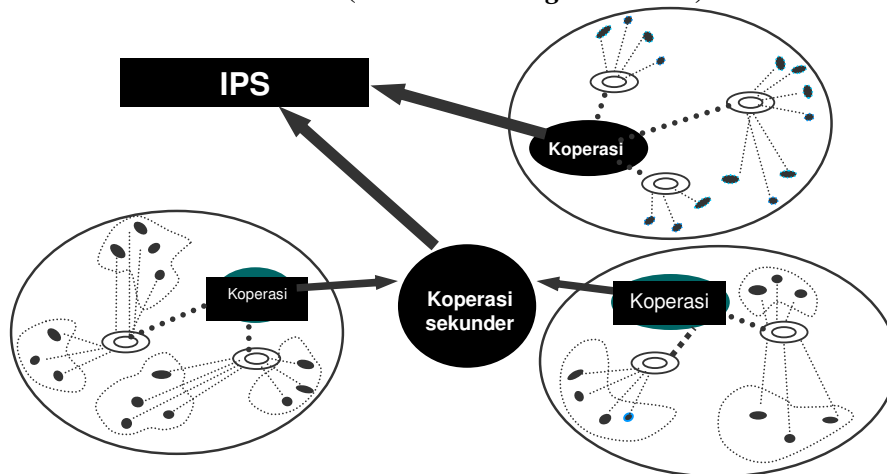
berupa lembaga perbankan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, pemerintah, koperasi, dan sebagainya. Subsistem pendukung ini dapat memberikan bantuan pada keseluruhan subsistem agribisnis sapi perah dalam rangka memberikan bantuan pinjaman, teknologi, dan peningkatan sumberdaya manusia pada masing-masing subsistem.

Oleh karena itu, pengembangan agribisnis berbasis sapi perah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Selain itu, secara kelembagaan antara peternak, koperasi dan IPS harus menjalankan pola kemitraannya secara sinergis. Bila tidak dilakukan, niscaya bisnis persusuan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan karena sistem kerjasama yang dibangun pada komoditas sapi perah ini adalah sistem integrasi vertikal dengan satu jenis produk yang sama, yaitu susu. Bila terjadi ketimpangan pada sistem agribisnis ini, maka akan berdampak pada kehancuran subsistem yang ada di dalamnya.

DISTRIBUSI SUSU, INPUT DAN SARANA PRODUKSI

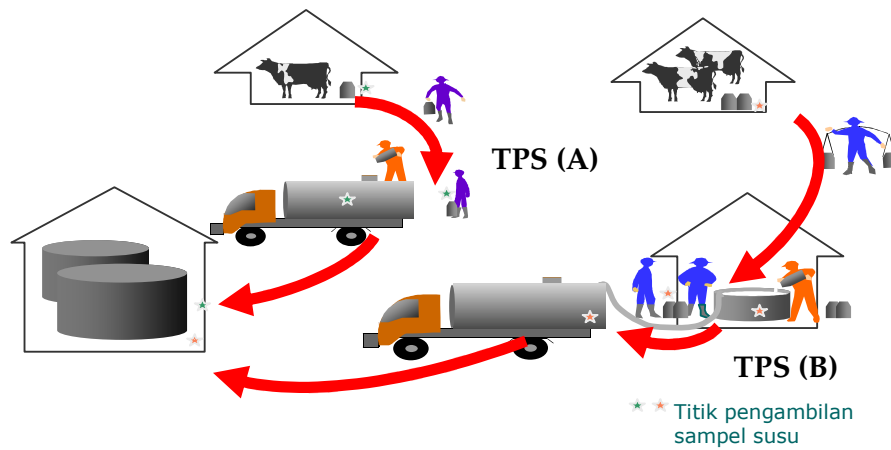
Bila kita melirik zoning dari sisi distribusi susu dari peternak sampai ke Industri Pengolahan Susu dapat dilihat pada Gambar 13.2. Peternak dari berbagai lokasi, baik yang berada di dataran rendah dan diperbukitan menyetorkan susunya kepada koperasi yang terdekat dengan wilayahnya melalui tempat pelayanan susu. Dari pelayanan susu tersebut, kemudian susu dari peternak dibawa ke koperasi untuk selanjutnya dikirim kepada IPS ataupun dijual langsung ke konsumen.

Gambar 2. Pola Sebaran DMU (*decision management unit*) Komoditas Susu

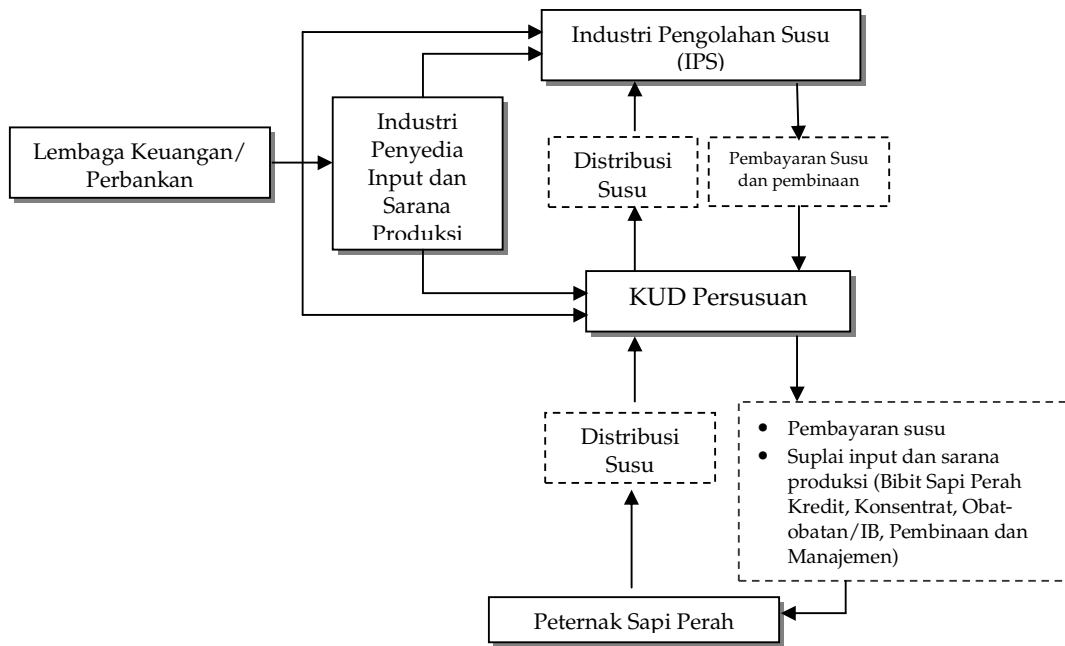


Keterangan:

- ⊙ Tempat Pelayanan (TPS)
- Pelayanan koperasi
- ➔ Saluran pemasaran *fresh milk*
- Peternak sapi perah



Gambar 3. Distribusi Susu dari Peternak ke TPS langsung Didistribusikan ke Cooling Unit di Koperasi Persusuan
(Jurusan Produksi Fakultas Peternakan Unpad, 2005)



Gambar 4. Distribusi Susu, Input dan Sarana Produksi Pada Sistem Agribisnis Sapi Perah

Berdasarkan Gambar 2, 3, dan 4 secara umum aliran disitribusi produk susu di mulai dari peternak. Para peternak dari berbagai lokasi mengantarkan susunya ke titik terdekat yang telah ditentukan oleh koperasi atau disebut juga Tempat Penampungan Susu (TPS). Selanjutnya, pada jam yang telah ditentukan,

susu-susu dari TPS tersebut diambil oleh koperasi melalui alat transportasi pengangkut susu untuk ditampung di koperasi. Selanjutnya pihak koperasi melakukan test dan uji kualitas susu yang dihasilkan peternak yang nantinya akan dikompensasi dengan harga susu per literanya. Susu yang ditampung oleh koperasi selanjutnya didistribusikan ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Pihak IPS memberikan pembayaran atas harga susu dan pembinaan berupa informasi harga ke koperasi. Pihak koperasi sendiri berperan memberikan pelayanan kepada anggotanya sebagai penyedia input dan sarana produksi, pembinaan terhadap peternak, pemberian kredit sapi, simpan pinjam, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

PERMASALAHAN PERSAPIPERAHAN

Perkembangan persusuan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menghambat perkembangan persusuan. Hasil identifikasi terhadap berbagai permasalahan persusuan di Indonesia diuraikan di bawah ini.

1. Kondisi Peternakan Sapi Perah Rakyat

Sebagian besar usaha peternakan sapi perah dikelola oleh peternakan sapi perah rakyat dengan skala usaha yang tidak ekonomis. Hasil penelitian Chai, dkk, (1996), di Jawa Barat menunjukkan skala usaha peternakan sapi perah sekitar 5,8 ekor/unit usaha dan kemampuan produksi sekitar 11,6 liter/ekor/hari. Sedangkan menurut Makin, (1998), rata-rata kemampuan produksi susu di Jawa Barat sekitar 8,20 kg/ekor/hari dengan skala usaha 3,3 ekor/peternak. Produksi susu ini, sebagian besar disalurkan ke Koperasi /KUD persusuan, yang kemudian di pasarkan kepada Industri Pengolahan Susu (IPS). Adapun layanan yang diberikan koperasi kepada peternak adalah memasarkan hasil produksinya, melayani kebutuhan konsentrat, obat-obatan, IB dan memfasilitasi penyaluran kredit yang diperlukan anggota.

Pada kenyataannya, usaha peternakan sapi perah rakyat ini, dihadapkan dalam dua masalah besar, yaitu masalah zooteknik dalam menghadapi pasar global serta masalah kelembagaan sosial ekonomi yang kurang mendukung terhadap kinerja usahanya. Kedua aspek tersebut, seperti lingkaran setan yang saling berkaitan. Sehingga, mengakibatkan perkembangan usaha peternakan sapi perah rakyat dalam kurun waktu duapuluh tahun ini seperti jalan ditempat.

2. Ketersediaan pakan

Satu permasalahan utama yang sering dialami oleh para peternak adalah kontinuitas masalah hijauan. Kita ketahui bahwa Indonesia mengenal dua musim, kemarau dan hujan. Pada musim hujan, hijauan sangat berlimpah sehingga para peternak tidak begitu susah untuk mencari hijauan. Tetapi apabila musim kemarau panjang datang, maka sudah jelas kesulitan yang terjadi adalah ketersediaan hijauan. Dari tahun ketahun permasalahan ketersediaan hijauan di musim kemarau menjadi momok yang besar dan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, baik oleh para peternak maupun koperasi. Sudah ada berbagai

upaya pengawetan hijauan, seperti silase, pengeringan hijauan, mengganti dengan sumber pakan lain, dan sebagainya belum efektif dalam memenuhi kebutuhan hijauan yang cukup besar tersebut.

3. Kendala Manajemen Peternakan Sapi perah Rakyat

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para peternak sapi perah di Jawa Barat menurut Makin (1998) dan Dadi Suryadi Dkk (2002) yaitu:

- a. Masih rendahnya produktivitas sapi perah yang dipelihara peternak, karena mutu genetik (bibit) sapi perahnya rendah, juga karena manajemen budidaya ternak dan kualitas pakan yang diberikan tidak memadai. Perbaikan kualitas sumberdaya peternak relatif lebih mudah ditingkatkan melalui pembinaan dan penyuluhan yang intensif. Tetapi yang menjadi problema cukup kompleks adalah bagaimana menyediakan stok bibit yang baik dan bahan pakan yang berkualitas dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan di daerah pengembangan.
- b. Rendahnya kualitas susu yang ditunjukkan antara lain oleh tingginya kandungan kuman sekitar rata-rata diatas 10 juta/cc, yang diakibatkan oleh sistem manajemen kandang yang tradisional, sehingga harga yang terbentuk pun menjadi rendah.
- c. Sapi perah sangat tergantung pada ketersediaan lahan sebagai penghasil pakan. Realitanya, lahan produktif bagi kepentingan peternakan sapi perah semakin terdesak oleh kebutuhan sektor lainnya.
- d. Rataan jumlah pemilikan ternak yang tidak efisien (3,3 ekor/peternak), sehingga kurang menjanjikan keuntungan bagi peternak. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri untuk meningkatkan skala usahanya, sehingga usaha peternak menjadi efisien. Sedangkan dilain pihak ketersediaan bibit (*replacement stock*) belum mampu disediakan sesuai dengan kebutuhan peternak saat ini.
- e. Semakin langkanya sumberdaya manusia berupa tenaga kerja muda yang berusaha di bidang peternakan sapi perah. Hal ini sebagai dampak dari pergeseran orientasi pembangunan yang mengarah ke sektor jasa dan industri.
- f. Belum terjadinya integrasi dan koordinasi yang harmonis antar lembaga pemerintah, swasta, koperasi dan peternak, sehingga berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kurang diantisipasi oleh para pelaku bisnis.

Dalam menghadapi pasar bebas, dan berbagai usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian yang komperhensif tidak saja dari sisi peternak (*on farm*) dan kelembagaan pada sub sistem lainnya (sub sistem *off farm* maupun sub sistem pendukung) tetapi juga dari aspek kebijakan persusuan maupun UU peternakan 6/1967. Sistem agribisnis persusuan yang masih tersekat-sekat, telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antar sub sistem, yang seharusnya terjadi saling ketergantungan antar sub sistem. Misalnya antara koperasi dengan anggotanya dan IPS, masih belum menampakan kekuatan bersama sistem persusuan di Jawa Barat.

4. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi

Berdasarkan data yang telah diungkapkan, masih terdapat kekurangan suplai susu untuk memenuhi permintaan di Indonesia. Sebagai contoh Jawa Barat saat ini harus melakukan impor susu sekitar 85.000 ton setiap tahun atau senilai 12 juta USD. Kekurangan tersebut, sebenarnya merupakan kesempatan bagi pengembangan peternakan sapi perah di Jawa Barat. Sehingga ketergantungan terhadap impor lambat laun dapat di kurangi. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk dan mengintensifkan pemasaran hasil.

Menurut Makin dkk, (1997) dalam rangka peningkatan mutu produksi susu lokal, harus ditindak lanjuti dengan sertifikasi produk. Dalam hal ini koperasi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagai lembaga Sertifikasi Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SPSMM). Dengan menerapkan sistem manajemen yang mengacu pada kaidah-kaidah ISO 9000, sehingga diharapkan produk susu lokal akan mampu bersaing di pasar global dimasa mendatang. Selain itu langkah lain yang diperlukan adalah mengantisipasi situasi perdagangan bebas, yang memberikan dampak berupa penentuan harga yang tidak ditentukan lagi oleh aturan sepihak, namun didasarkan kepada interaksi kekuatan permintaan dan penawaran, dan hilangnya berbagai bentuk proteksi, yang dapat mengakibatkan diserbunya pasar potensial Indonesia oleh susu impor.

Jawa Barat merupakan pusat pasar bagi komodoti susu, hal ini disebabkan karena susu memiliki nilai elastisitas pendapatan lebih dari satu ($e = 1,682$). Hal tersebut berarti semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsinya akan susu. Berdasarkan perkembangan permintaan dan penawaran susu dapat dilihat proyeksi konsumsi susu di Jawa Barat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Proyeksi Konsumsi dan Suplai Produksi Susu (ton) di Propinsi Jawa Barat

No.	Tahun	Permintaan	Suplai	Kekurangan	
				Total	%
1.	2001	282.348	195.155	87.193	30,88
2.	2002	291.860	222.704	69.156	23,69
3.	2003	307.840	265.096	42.744	13,89
4.	2004	325.571	303.781	21.790	6,69
5.	2005	346.136	343.941	2.195	0,63

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, 2001

5. Koperasi Persusuan

Sebagian besar kondisi usaha peternakan sapi peah di Jawa Barat dikuasi oleh peternak rakyat dalam lingkup Koperasi dan UKM, tetapi dalam percaturan pemasaran hasil usahanya masih didominasi oleh perusahaan Industri Pengolah

Susu. Dimana dalam proses penyalurannya masih menggunakan jalur koperasi dan pasar akhirnya adalah IPS. Hal ini lebih disebabkan:

- a. *Orientasi usaha masih subsisten.* Umumnya Koperasi dan UKM melakukan kegiatan usahanya masih berorientasi subsisten. Artinya kegiatan yang dilakukannya hanya memenuhi kebutuhan hari ini. Orientasi sesungguhnya masih kepada produksi (budidaya), belum mampu menyusun kekuatan pasar dan sarana produksi. Akibatnya sub sistem Koperasi dan UKM masih *memiliki ketergantungan* usaha terhadap sub sistem lainnya, yang seharusnya terjadi *salingsaling ketergantungan* antar sub sistem. Untuk mengetahui, koperasi tersebut maju dan berorientasi ekonomi dicirikan, dengan kehadiran/kekuatan Riset dan Pengembangan dalam organisasi koperasi tersebut.
- b. *Kendala operasionalisasi kebijakan pemerintah.* Di lapangan masih dirasakan Koperasi dan UKM merupakan ajang atau obyek dari proses pembangunan bukannya subyek pembangunan. Kenyataan ini, tampak dari berbagai kebijakan yang ada, selalu diikuti dengan kegagalan dan kemacetan di sana-sini (contoh kasus, KUT dan kredit program lainnya). Hal tersebut mungkin lebih disebabkan oleh profesionalisme SDM yang melakukan transfer kebijakan masih rendah dalam menghadapi gerakan Koperasi.
- c. *Sumber Daya Manusia (SDM).* Koperasi dan UKM masih belum mampu menghargai tingkat profesionalisme SDM yang ada. Berbeda dengan dunia usaha skala Besar. Akibatnya tenaga-tenaga profesional enggan berkiprah di Koperasi dan UKM. Selain itu, masih kentalnya budaya memilih tokoh/masyarakat serba bisa, padahal kondisi yang diperlukan adalah seorang wirausaha yang profesional. Di samping itu, karena tidak profesionalnya para pengurus dan karyawan maka banyak yang menjalankan koperasi yang tidak amanah sehingga koperasi menjadi bangkrut.

6. Permasalahan Industri Pengolahan Susu

Seiring dengan dibebaskannya perusahaan pengolahan susu untuk tidak selalu menyerap susu dari peternak dan diberikannya kebebasan impor susu, maka para peternak dan koperasi harus mampu bersaing dengan produk susu dari luar negeri. Saat ini, susu segar dalam negeri masih terselamatkan dengan harga susu tepung impor yang relatif mahal dibandingkan dengan susu segar dalam negeri. Selain itu, untuk produk *ultra high temperature* yang diproduksi oleh perusahaan dalam bentuk susu cair kemasan masih menjadi penolong bagi susu segar dari peternak karena IPS tidak berani membayar mahal untuk mengimpor susu cair dari luar negeri.

Selama ini, 80% susu dari peternak diserap oleh IPS. Inilah yang menjadi satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan terutama berkaitan dengan harga dasar susu yang diterima oleh IPS. Harga susu yang diterima peternak dari IPS belum mengalami kenaikan padahal biaya produksi sudah semakin meningkat. Ini yang menjadi tugas dari GKSI untuk memperjuangkan peningkatan harga susu yang diterima peternak dari IPS. Tentunya standar harga susu yang ditetapkan oleh IPS dikaitkan dengan upaya kualitas susu yang diterima peternak. Sampai saat ini harga standar susu segar

yang diterima peternak adalah Rp 1.725/liter dengan standar TS = 11,3 % dan TPC sebesar 1 juta.

DAFTAR PUSTAKA

Bungaran Saragih, Rahmat Pambudy, dan Tungkot Sipayung. 2000. Kumpulan Pemikiran: Agribisnis Berbasis Peternakan. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor

Bungaran Saragih, Rahmat Pambudy, dan Tungkot Sipayung. 2001. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor

Nur Kasim, **Achmad Firman**, dan Willyam Djaya. 2004. Kajian Pengembangan Model Unit Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Peternakan. Kerjasama Fakultas peternakan dan Dinas Peternakan Jawa Barat. Bandung.

Rohadi Tawaf dan **Achmad Firman**. 2005. Industri Peternakan Sapi Perah di Indonesia (Draft). Fakultas Peternakan Unpad. Bandung

Rohadi Tawaf, **Achmad Firman**, Sri Rahayu, Sondi Kuswaryan, Hasan Hadiana, Unang Yunasaf, Adjat Sudradjat, Cecep Firmansyah, dan Jajang Gumilar. 2003. Analisis Kelayakan Usaha Kemitraan Sapi Potong, Sapi Perah Dan Ayam Ras. Kerjasama Fakultas Peternakan Unpad dan Dinas Peternakan Jawa Barat. Bandung

Hasan Hadiana, **Achmad Firman**, dan **Rohadi Tawaf**. 2005. Analisis Biaya Produksi Susu Segar Pada Peternak Sapi Perah Anggota GKSI Jawa Barat. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran dan GKSI Jawa Barat. Bandung